

HEMPASAN BADAI KAPITALIS

Farid Th. Musa

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstract: Development of Agriculture using modern technology and names pengentasan poorness is not one steps to increase farmer life level. Exactly happened is capitalization in agriculture area exploiting human resource and sumberdaya the nature in rural. The role of government expected as public or community protector exactly not happened, but has become komprador capitalist. Seed usage, fertilizer, company product pesticide, be image of capitalization in agricultural sector which capital intensive, and exactly kills efficiency of farmer to process the agricultural land based on knowledge owned by it.

Thereby third usage of equipment produce of above mentioned is striving government to make way for capitalist circle to do newfangled colonization. So this thing is not solution for pengentasan poorness of farmer in rural, but is an action of murder to local wisdom owned by farmer embracing principle subsistensi.

Kata Kunci: kapitalis, kemiskinan, pertanian

Pendahuluan

Pergeseran paradigma pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan didesentralisasikan mengacu pada beragamnya keinginan dan harapan masyarakat, yang kadang-kadang program pemerintah pusat tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat daerah. Untuk memaksimalkan pembangunan agar dapat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang otonomi daerah. Dari segi kemasyarakatan tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat sehingga masyarakat makin mandiri (*selfsustain*) dan tidak terlalu bergantung kepada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan (Koswara, 2001: 93-94). Persoalannya adalah apakah program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai perpanjangan

tangan pemerintah pusat, sudah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat di daerah? Dan apakah program pemerintah daerah telah menciptakan keadilan bagi semua penduduk yang tinggal di pedesaan? Bisa jadi program yang dilaksanakan hanya bermanfaat bagi segelintir orang, yang memanfaatkan ketidakberdayaan penduduk di pedesaan, yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan kehidupannya dilingkari oleh kemiskinan.

1. Pembangunan Pertanian di Indonesia

Pembangunan yang dilakukan sekarang ini, dilekatkan pada suatu upaya untuk merubah suatu kehidupan ke arah yang lebih maju. Konsep pembangunan dijalankan berdasarkan pemikiran yang diadopsi dari pikiran W.W. Rostow, seorang ekonom Amerika Serikat, yang diberi gelar sebagai bapak teori pembangunan dan pertumbuhan. Bagi Rostow, pembangunan ditafsir sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern yang dibagi dalam beberapa tahap yakni tahap pertama adalah masyarakat tradisional, kemudian berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, kemudian masyarakat pematangan pertumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang dicita-citakan, yakni masyarakat industri yang disebutnya sebagai masyarakat konsumsi masa tinggi. Proses evolusi inilah yang menjadi pijakan negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia, untuk merubah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun menurut Mansour Fakih, (2002: 70) bahwa semua strategi pembangunan setelah perang dunia selalu dikritik karena ternyata semua pendekatan pembangunan dalam kenyataan gagal memenuhi janji mereka mengejahterakan rakyat di Dunia ketiga. Yang terjadi sebaliknya, pembangunan telah membawa dampak negatif, di antaranya pembangunan telah melanggengkan pengangguran, menumbuhkan ketidakmerataan, menaikkan kemiskinan absolut, dan lain sebagainya.

Demi meningkatkan taraf hidup masyarakat dan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dijadikan kunci untuk membuka ketertinggalan bangsa. Paradigma pembangunan manusia melalui pemberdayaan masyarakat dijadikan salah satu terobosan untuk membenahi persoalan-persoalan masyarakat, baik secara nasional maupun lokal. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan bukan sebagai obyek pembangunan. Di sektor pertanian, pembangunan identik dengan pemberdayaan masyarakat desa. Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian desa yang dianggap dapat menopang sistem perekonomian nasional. Di zaman orde baru pembangunan nasional

dilaksanakan berdasarkan paradigma pertumbuhan, yang tertuang pada pernyataan Menteri Sadli (1973) sebagai berikut: "...pemerintah baru berusaha membangun kembali perekonomian di atas prinsip-prinsip mekanisme pasar, perekonomian terbuka, iklim moneter yang stabil, pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, serta bantuan dan investasi dari luar negeri. Sistem ekonomi baru ini lebih merupakan sistem insentif daripada sistem alokasi dan distribusi. Mekanisme harga, kebijaksanaan-kebijaksanaan moneter dan perkreditan serta lain-lain, semua ini dipergunakan untuk melengkapi sebuah kerangka yang melalui isyarat-isyarat harga dan kestabilan merangsang kaum enterpreneur untuk mengadakan investasi, inovasi dan produksi".

Pemberian ruang kepada pihak swasta untuk mengolah sektor pertanian, akan berdampak pada cara produksi dan penggunaan alat produksi. Prinsip swasta yang selalu mengejar keuntungan dan lebih berpihak pada penggunaan teknologi modern, berdampak pada peminggiran kemampuan petani dalam bercocok tanam dan lapangan pekerjaan. Sehingga hal ini bukan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani tetapi menciptakan pengangguran dan pemeliharaan kemiskinan.

Keterbelakangan dan kemiskinan petani harus dilihat dari sudut pandang eksistensi hidup untuk mendapatkan kehidupan yang sejajar dengan orang lain. Sebagai makhluk yang dikarunai akal, setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki taraf hidup. Perbaikan taraf hidup ini, tentunya tidak hanya dilakukan oleh petani itu sendiri, tetapi harus ditopang oleh masyarakat di mana individu tersebut hidup. Kebersamaan senasib dan sepenanggungan, antara petani yang ada di pedesaan dan kalangan akademisi, yang mempunyai kepedulian untuk memerdekakan petani dari kungkungan ketidakadilan, perlu dilakukan untuk mengontrol segala bentuk kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian. Terkadang kebijakan pemerintah justru menyumbat dan membelenggu potensi yang dimiliki petani, hanya karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi pertanian. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengharuskan penyeragaman tanaman atau penggunaan benih hibrida adalah tindakan yang tidak menghargai kemampuan petani. Sehingga konsep pembangunan terlihat lebih didominasi oleh kepentingan negara untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, daripada keberpihakan terhadap petani. Padahal jika dikaji lebih mendalam, semua program pada sektor pertanian yang dilaksanakan di Indonesia, selalu saja mengatasnamakan pemberdayaan petani. Realitasnya, petani tidak merasakan keuntungan dari

program tersebut dan dibiarkan bergelut dengan kemiskinan yang tidak berujung.

Kebijakan yang pernah dilakukan pemerintah orde baru tahun 1967 yang dikenal dengan Revolusi Hijau, telah mengubah sistem pertanian dari *multisistem* ke *monosistem*, dari *multikultur* ke *monokultur*, berdampak pada semakin tingginya biaya produksi yang ditanggung oleh petani. Semua alat produksi, mulai dari benih, pupuk dan pestisida yang harus dibeli oleh petani, telah menciptakan ketergantungan akan benih, pupuk dan pestisida, yang membutuhkan biaya yang besar. Di sisi lain penggunaan pupuk anorganik, pestisida secara terus menerus untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman, justru telah menciptakan malapetaka dengan rusaknya kondisi tanah dan biologis. Sehingga hal ini bukannya merubah kehidupan petani menjadi lebih baik, tetapi telah menambah biaya produksi yang tinggi yang justru sangat memberatkan petani. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penggunaan bibit hibrida, oleh Todaro (1983: 415) dianggap hanya memenuhi kebutuhan dan menguntungkan tuan-tuan tanah yang kaya raya saja.

Kebijakan lain yang dilakukan pemerintah yang tidak memihak petani adalah Inpres No. 9/1975 mengenai program Tebu Takyat Intensifikasi (TRI). Yustika, (2003: 36) menjelaskan program Tebu Takyat Intensifikasi sebagai berikut: "Program ini memiliki dua tujuan pokok: meningkatkan produksi tebu dan mengubah struktur produksi tebu dari semula ditanam pabrik gula menuju petani rakyat (Brown, 1982: 3; Mardjana, 1995: 96). Namun, dalam operasionalisasinya pemerintah menggunakan cara-cara pemaksaan agar rakyat menanam komoditas tebu tersebut. Rakyat sendiri sebagian keberatan dengan model paksa itu karena dipandang menanam tebu kurang menguntungkan dibandingkan dengan menanam tanaman pangan (padi dan palawija). Akibatnya, banyak sawah-sawah milik bagi petani yang menolak menanam tebu dibulduzer. Bahkan yang lebih tragis lagi, petani-petani yang menolak program tersebut dijemput aparat militer dari kediamannya, dibawa dan ditahan layaknya terdakwa kejahatan atau tawan perang (Bachriadi). Di samping tidak menanam tebu, petani seringkali menunjukkan sikap pembangkangannya dengan jalan membakar tebu yang siap panen, terutama bila pabrik gula ingkar janji untuk menebang tepat waktu sesuai perjanjian.

Terbitnya Undang-undang nomor 12 tahun 1992 yang mengatur tentang budidaya tanaman, Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2004 tentang penanaman, pendaftaran dan penggunaan benih varietas

asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, bukannya memberi ruang kepada petani untuk berpartisipasi memajukan sektor pertanian secara mandiri, tetapi lebih memperlancar kepentingan perusahaan multinasional untuk mengintervensi sektor pertanian. Sehingga gelombang kapitalis telah memasuki lingkaran kehidupan petani yang cenderung mengharapkan kekuatan alam untuk eksis dalam pengolahan lahan pertaniannya.

Penggunaan benih jagung hibrida produk perusahaan benih pada sistem pertanian modern adalah upaya yang di pelopori oleh perusahaan-perusahaan kapitalis untuk mengintervensi petani dalam pemanfaatan lahan pertanian. Bila dikaitkan program pemerintah untuk budidaya jagung hibrida dan kebiasaan petani menanam jagung lokal, maka pemerintah berdiri pada dua kaki yang berbeda tempat. Jagung hibrida adalah komoditi yang berorientasi pada peningkatan produksi yang padat modal dan bertujuan memenuhi permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, pada sisi yang lain terdapat kebiasaan petani menanam jagung lokal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan untuk dimakan agar bisa bertahan hidup. Di posisi inilah pemerintah sebagai penanggung jawab kelangsungan hidup rakyatnya, sekaligus sebagai komprador kapitalis.

Adanya peluang bagi pemilik modal (kapitalis) memproduksi dan menjual benih jagung, yang kemudian membeli produksi jagung petani, berdampak pada penetapan harga dilakukan berdasarkan kemauan pengusaha. Menurut Ridho Saiful Ashari, bahwa jika satu ton jagung dengan harga jual Rp 1200/kg maka petani mendapat Rp 1.200.000 (belum dikurangi biaya produksi). Sementara kalau PT. BISI menjual katakanlah dengan memakai asumsi harga keluaran dari gudang sebesar Rp 40.000/kg X 1 ton (10.000 kg), maka omzet perusahaan adalah Rp 400 juta/ton (Ashari, 2005-2008).

Penjelasan Ridho Saiful Ashari, menggambarkan nasib petani yang sehari-hari bekerja dibawah terik sinar matahari, dan hanya dihargai 3% dari keuntungan pihak perusahaan, merupakan tindakan penghisapan terhadap manusia yang bermata pencaharian disektor pertanian yang dilakukan oleh kaum kapitalis

Sistem kapitalisme yang sempurna menghendaki, negara sama sekali tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis. Negara hanya ditempatkan sebagai “*anjing penjaga malam*”, yang akan menjaga agar tidak terjadi pelanggaran atas hukum yang “adil”. Masalah bisnis akan diatur sendiri oleh pasar melalui tangan-tangan yang tak kelihatan (*invisible hand*). Tetapi gambaran klasik mengenai sistem kapitalisme yang sempurna tersebut hanya pernah ada di atas kertas. Realitas perkembangan kapitalisme tidak seturut dengan angan-angan para penggagasnya. Terbangunnya perusahaan-

perusahaan yang memonopoli industri dan perdagangan tidak terhindarkan. Perusahaan-perusahaan kecil gulung tikar, perusahaan-perusahaan raksasa saling merger yang mengakibatkan monopoli dan konglomerasi gila-gilaan. Masing-masing perusahaan besar memonopoli industri dan perdagangan dari sektor hulu hingga hilir. Akibatnya, negara dipaksa untuk ikut campur dalam urusan bisnis, yang pada mulanya untuk mengerem terjadinya monopoli. Tetapi adanya realitas campur tangan negara ini mendorong semua sektor masyarakat berebut pengaruh atas negara. Perebutan terjadi baik antara kapitalis sendiri maupun antara sektor kapitalis dengan masyarakat sipil. Dimana kapitalis memenangkan perebutan pengaruh, negara dengan seluruh aparaturnya yang sedemikian besar akan sepenuhnya mengabdikan dan melayani kepentingan kapitalis.

Monsanto sebagai salah satu kapitalis besar di bidang agro-industri tak lepas dari pergulatan memperebutkan kendali negara, baik negara-negara Utara maupun negara-negara Selatan. Sebagaimana halnya kapitalis yang lain, di belahan bumi yang satu berhasil dengan gemilang, sedang di bagian bumi yang lain mengalami kegagalan. Di Amerika Serikat, sebuah negara yang paling telanjang di dalam membela dan melayani kepentingan kapitalis, Monsanto berhasil dengan gemilang. Bukan hanya FDA (badan pengawasan obat dan makanan Amerika Serikat) yang dapat dikendalikan dengan baik oleh Monsanto, tetapi hampir seluruh aparaturnya berada dalam kendali Monsanto. Tetapi di Eropa, Monsanto menemui batu sandungan yang amat besar. Namun demikian kiranya perlu diingat, bahwa negara-negara dimana Monsanto mengalami kegagalan tidak berarti bahwa negara-negara yang bersangkutan bebas dari kendali kapitalis. Masih banyak kapitalis lain yang mempunyai kemampuan yang sama, bahkan mungkin lebih baik dari Monsanto, tetapi yang mempunyai kepentingan dan pandangan yang berbeda. Mungkin salah satu dari mereka yang memenangkan pergulatan memperebutkan kendali negara di kebanyakan negara-negara Eropa.

2. Ketergantungan Petani Terhadap Kapitalis

Ketergantungan negara pinggiran terhadap negara pusat yang dianggap sebagai pemegang kendali yang menguasai sistem ekonomi, yang dianggap sebagai anti pembangunan dan tak akan pernah melahirkan pembangunan. Pemikiran ini berdasarkan pada tataran interaksi yang menyumbat peluang persamaan derajat pada tingkat antar negara yang didominasi oleh negara pusat terhadap negara pinggiran, sehingga negara pusat dianggap sebagai majikan dan negara dunia ketiga sebagai buruh. Paradigma teori ketergantungan memiliki saran yang radikal, karena teori ini

berada dalam paradigma neo-Marxis yang digunakannya, memiliki sudut pandang dari negara pinggiran. Asumsi dasar teori ketergantungan adalah menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, yang dilihat dari aspek kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem kapitalis.

Penggunaan teknologi dalam sistem pertanian modern yang dihasilkan oleh negara maju, telah menyebarkan virus ketergantungan terhadap produk perusahaan yang bergerak di bidang pangan. Dengan mengatasnamakan produk melimpah yang akan menghilangkan kemiskinan dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani, para ilmuwan bahkan pemerintah merestui dan mendukung penggunaan benih hibrida, pupuk kimia dan pestisida yang mematikan. Berawal dari pemberian secara cuma-cuma benih hibrida, pupuk anorganik, pestisida, perusahaan-perusahaan multinasional memasuki negara-negara yang berpotensi untuk memberikan kebutuhan bahan pangan. Tanpa disadari, kemurahan hati dari perusahaan kapitalis yang menguasai teknologi pertanian, menjadi mesin pembunuh kearifan petani yang mempunyai kecakapan untuk mengolah lahan pertaniannya.

Di Amerika Serikat, saat ini Monsanto menguasai 85% pasar benih kapas, 33% benih kedelai dan 15% jagung. Suatu peningkatan yang menyesak dada ketika kita tahu bahwa sampai tahun 1993, Monsanto tidak terlibat dalam pasar benih. Sebagai hasil pembelian dan penggabungan perusahaan benih, Monsanto telah merajut sarang perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang bertugas memproduksi dan mendistribusikan produk-produknya. Ia telah menciptakan anak-anak perusahaan, mengikat aliansi-aliansi, dan membuat *joint-ventures* dengan puluhan perusahaan dan pusat-pusat penelitian. Misalnya, perusahaan Flamel Technologies di Perancis telah menjadi mitra Monsanto pada tahun 1998 untuk pengembangan suatu formula Roundup yang lebih baik. Di India, perusahaan Rallis India telah menandatangani sebuah perjanjian dengan Cargill Seeds (saat ini Monsanto), untuk mendistribusikan benih dan herbisida Monsanto di tengah-tengah jaringannya yang kuat dengan 3.000 pedagang dan 30.000 lokasi penjualan. Kita dapat menemukan anak-anak perusahaan Monsanto atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengannya di Finlandia, Zimbabwe, Argentina, Ukraina, Afrika Selatan, dan Cina (Kuyek, 2000).

Raksasa-raksasa agrobisnis, umumnya bekerja sama erat dengan otoritas negara, bersusah payah demi menaklukkan petani-petani kecil dengan retotika luar biasa atas produk mereka. “Jika anda memakai bibit kami, anda

akan punya mobil dan istri”, janji seorang agen Cargill kepada sekelompok petani Filipina di Propinsi Cotabato Utara!

Peralihan sistem pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern, telah melahirkan perbedaan perspektif tentang sistem pertanian. Penggunaan tenaga hewan dilekatkan pada sistem pertanian yang hanya memproduksi keperluan bahan makan untuk bisa bertahan hidup, sedangkan penggunaan teknologi modern berorientasi pada sistem pertanian yang mengejar produksi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian. Bagi petani yang masih tradisional, aktivitas pertanian condong menggunakan fasilitas yang berada disekitar kehidupannya yang alami. Penggunaan benih yang diambil dari hasil penemuan sendiri, pemupukan yang menggunakan metode misalnya pembakaran, adalah salah satu kebiasaan yang telah dilakukan turun temurun. Sedangkan untuk pertanian modern, sistem pertanian sudah dilakukan berdasarkan inovasi pertanian. Pengolahan tanah menggunakan traktor, penggunaan benih, pupuk, pestisida yang telah diproduksi pabrik, penggunaan mesin pemipil dan produksi hasil panen yang berorientasi pasar, merupakan cara bercocok tanam yang digunakan dalam pertanian modern. Perbedaan sistem pertanian yakni tradisional dan modern dalam sosiologi dijelaskan oleh Raharjo (2004:128) sebagai berikut: Dalam sosiologi terdapat dua perspektif yang bertentangan satu sama lain yakni yang satu adalah perspektif ekologis, yang lain adalah perspektif teknologisme. Prespektif ekologis merupakan kerangka wawasan yang tepat untuk menyimak determinasi faktor pertanian terhadap corak kehidupan masyarakat desa (masyarakat petani khususnya) yang belum memiliki tingkat teknologi (modern). Untuk masyarakat petani yang telah menggunakan teknologi dalam sistem pertanian modern, kerangka yang paling tepat adalah perspektif *materialism*. Dalam perspektif ini, sistem produksi pertanian yang telah kompleks, dengan teknologi modern dan yang orientasinya pada keuntungan, dilihat sebagai dasar yang menentukan kehidupan masyarakat desa/petani.

Kedua perspektif yakni ekologis dan materialisme yang mewarnai pemaknaan kehidupan petani dan sistem pertaniannya. Pemaknaan Kehidupan petani yang ditampilkan oleh kecurian yang bersifat alami merupakan gambaran karakteristik petani desa yang bersahaja. Kondisi yang alami ini, memungkinkan keterikatan antara unsur manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang terintegrasi dalam ekosistem. Dapat dikatakan bahwa, kehidupan manusia bergantung pada keberadaan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang masih terpelihara, yang menjamin tersedianya semua kebutuhan makanan dari proses bercocok tanam. Energi hewan dapat diartikan sebagai sumber kekuatan untuk pengolahan tanah pertanian,

kotorannya berfungsi sebagai bahan pemupukan, dan juga bisa dijadikan lambang untuk status sosial seseorang di dalam masyarakat. Demikian pula tumbuhan yang dapat berfungsi untuk melengkapi kebutuhan manusia mendapatkan sumber makanan. Saling tukar energi menurut pola tertentu antara berbagai komponen dari ekosistem itu, oleh Haeckel (pendiri bidang ekologi) (Geertz, 1976: 4) dinamakan "*fisiologi extern*", yaitu pada waktu benda-benda hidup mengambil bahan dari sekitarnya sebagai makanannya dan kemudian membuang bahan itu kembali sebagai produk sisa. Dan seperti halnya dalam fisiologi intern, pemeliharaan keseimbangan sistem atau homeostatis itu adalah kekuatan pengatur pusat, yang dalam konteks ini biasa disebut "perimbangan alam" (*the balance of nature*).

Sedangkan penggunaan benih transgenik produk perusahaan benih, pupuk anorganik, pestisida dalam program pemerintah, melambangkan ketidakberdayaan negara menghadapi kekuatan kapitalis yang dianggap dapat meningkatkan taraf hidup petani. Berbagai cara dilakukan perusahaan kapitalis untuk membujuk negara, agar mendukung setiap langkah yang mereka lakukan demi mengejar keuntungan. Tanpa disadari kapitalisasi disektor pertanian telah menjadikan petani sebagai arene eksploitasi dan tempat berjingkrak kaum kapitalis. Membanjirnya Benih produk perusahaan yang menjadi primadona petani, telah menghancurkan kecakapan petani dalam menciptakan benih, serta mencerminkan keberhasilan kapitalis. Perlu disadari bahwa untuk mencapai yang diinginkan, kaum kapitalis merekayasa perilaku petani tradisional dalam bentuk yang halus melalui pengenalan hasil rekayasa genetik tumbuhan, untuk memperoleh keuntungan dari hasil keringat petani.

Bergesernya perilaku petani yang awalnya sebagai pencipta benih yang kemudian menjadi konsumen benih, terkait erat dengan upaya pemerintah untuk mendorong petani menaikan produksi pertanian. Pengenalan jenis-jenis benih unggul yang dapat meningkatkan produksi pertanian yang berlipat ganda dari benih lokal, dilakukan dengan mengeluarkan aturan-aturan yang menjamin penggunaan benih berlabel. Sehingga hal ini bukannya merubah kehidupan petani menjadi lebih baik, tetapi telah menambah biaya produksi yang tinggi yang justru sangat memberatkan petani. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang penggunaan bibit hibrida, oleh Michael P. Todaro (1983: 415) dianggap hanya memenuhi kebutuhan dan menguntungkan tuan-tuan tanah yang kaya raya saja.

3. Kegagalan Pembangunan Pertanian

Seandainya semua orang sadar dan mengakui bahwa, kehidupan manusia bergantung pada petani untuk memenuhi kebutuhan bahan makan dalam rangka mempertahankan hidup, seharusnya kehidupan petani lebih sejahtera dan makmur dibanding manusia lain di muka bumi ini. Realitasnya, justru komunitas petani dibalut oleh kondisi yang memprihatinkan dan penuh dengan penderitaan, yang diakibatkan oleh kemiskinan yang tak berujung. Masyarakat sangat miskin. Hidup adalah perjuangan terus menerus dengan alam (Mendel, 2006: 11). Kelaparan dan bila makan masih kekurangan gizi, tempat tinggal untuk melindungi diri dari ganasnya alam masih memprihatinkan, tingkat pendidikan yang masih sangat rendah, terlihat pada kehidupan petani yang diakibatkan oleh kemiskinan. Kalaupun ada program yang mengatasnamakan kemiskinan, belum menjangkau substansi persoalan kemiskinan di pedesaan. Mungkin sekedar mengingatkan bahwa jangan sampai terjadi lagi bencana kelaparan dalam tahun 1856-1857, yang pernah terjadi di daerah kering Burma Hulu, dimana “hujan tak kunjung tiba dan padi layu mengering di sawah... dan orang-orangpun mati. Mereka mati di ladang-ladang ketika sedang mengerah kulit pohon; mereka mati di jalan raya dalam pengembaraan mencari makanan; mereka mati di rumah-rumah (Scoot, 1981:1). Di manakah letak program yang mengatas namakan kemiskinan masyarakat desa yang telah menyedot biaya yang begitu banyak, namun tidak dapat mengatasi kemiskinan petani sebagai guru di bidang pertanian?

Terlalu naif jika kemiskinan dikatakan sebagai kodrat dan kehendak tuhan terhadap masyarakat yang bermata pencaharian dari usaha taninya. Juga suatu pemahaman yang keliru jika penggunaan teknologi modern yang padat modal, dikatakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Justru yang terjadi, penggunaan teknologi modern sebagai pemiskinan terhadap masyarakat pedesaan. Jika mau jujur, penggunaan teknologi modern dalam sistem pertanian, berdampak pada teralienasi masyarakat dari kebiasaan hidup sebagai manusia yang otonom, yang dapat menentukan pilihan untuk mempertahankan hidup. Mungkin bagi sebagian orang teknologi modern membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih maju, dimana segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tetapi perlu dipahami, penggunaan teknologi berdampak pada ketidakberdayaan manusia melawan mesin-mesin yang awalnya untuk meringankan pekerjaan, yang kemudian menjadi saingan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada posisi inilah tenaga manusia menjadi tidak berharga. Tidak ada pilihan kecuali menerima tawaran dengan upah yang rendah daripada harus menganggur. Marcuse mengatakan

bahwa teknologi sebagai alat untuk menguasai rakyat. Teknologi membantu menindas individualitas (George & Douglas 2003:180).

Penggunaan benih hibrida, pupuk, pestisida yang harus dibeli untuk peningkatan produksi pertanian, bukan solusi untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi telah mengundang kaum kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Penggunaan alat produksi tersebut, tidak lain hanyalah untuk membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan kapitalis yang bergerak dibidang pertanian, untuk menjajah kearifan lokal yang dimiliki petani yang menganut prinsip subsistensi. Dalam buku *Dusta Industri Pangan* tulisan Delforge yang diterjemahkan Mansour Faqih alm, (*insist 2000*) bahwa kehadiran korporasi benih pangan yang menjadikan pangan sebagai alat “penjajahan baru” atas manusia lain telah dilakukan sejak masa revolusi hijau di Indonesia (1968). Sebab masa depan pangan umat manusia akan dibuat tergantung kepada industri benih. Dengan demikian penjajahan baru yang terjadi selama ini merupakan hempasan badai kapitalis yang akan memporak-porandakan kehidupan petani, yang dimainkan oleh negara, swasta dan asing. Oleh karena itu, kegagalan pembangunan yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh adanya dusta di antara kita untuk memperjuangkan nasib komunitas petani pedesaan.

Penutup

Hempasan badai kapitalis yang dimainkan oleh perusahaan multinasional yang berkecimpung di bidang penciptaan alat produksi pertanian, telah menjadikan petani berada pada posisi yang lemah akibat dari modernisasi pertanian. Peran pemerintah yang seharusnya menciptakan kondisi ekonomi petani yang mapan, telah terkontaminasi oleh satu prinsip yang didasarkan atas peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya pembangunan pertanian bukannya mengsejahterakan petani, tetapi justru terjadi pemiskinan masyarakat pedesaan dan berjingkraknya kaum kapitalis yang mencari keuntungan diatas penderitaan petani. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan petani di pedesaan, program pembangunan harus mengedepankan kearifan petani serta orientasi pertanian padat karya.

Daftar Pustaka

- Ashari, Ridho Saiful. 2005-2008. *Direktur Eksekutif Daerah WALHI* .Jawa Timur.
- Ernest Mandel. 2006. *Tesis-tesis Pokok Marxisme*. Mahendra K: Yogyakarta .

- Fakih, Mansur. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Geertz, Clifford. 1976. *Involusi Pertanian*, S. Supomo, Brhatakara K.A, Jakarta .
- George Ritzer-Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media.
- Kertapraja Koswara E., 2001. *Otonomi Daerah*. Yayasan PARIBA
- Kuyek, D. "Corporate Profile: Monsanto," Pesticide"
- Raharjo. 2004. *Pengantar sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta .
- Scot James C, 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Lembaga Penelitian, Hasan Basari, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial: Jakarta .
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 1983. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Aminuddin-Mursid: Ghalia Indonesia .
- Yustika Erani Ahmad. 2003. *Negara vs Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.